

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan Republik Indonesia pada saat ini mengalami perubahan di berbagai sektor, seperti di sektor Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah digunakan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini didasari kebijakan Pemerintah yaitu desentralisasi, Pemerintah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik disarankan menciptakan kinerja dengan mengedepankan kepentingan publik, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik yang transparan dan berkualitas. Tuntutan yang semakin tinggi ini menjadi pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat yang telah memberi amanah kepada Pemerintah Daerah. Tanggung jawab yang telah diberikan dari penyelenggara negara harus dijalankan dengan baik, maka Pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan dengan konsep *good governance* yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah mengenai penggunaan anggaran negara untuk dimaksimalkan pada pelayanan publik. Yang berarti bahwa seluruh proses kegiatan dan penganggaran harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Ketika akuntabilitas publik

dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan memengaruhi kinerja di setiap SKPD dan dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun eksternal.

Anggaran adalah suatu data yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran finansial untuk jangka waktu tertentu, maka faktor penting dalam pencapaian keberhasilan suatu organisasi yaitu proses penyusunan anggaran. Anggaran dapat searah dengan tujuan jika terbentuk kerjasama antara atasan dengan bawahan saat proses penyusunan anggaran yang disebut partisipasi anggaran. Dalam proses penyusunannya partisipasi anggaran mengikutsertakan bawahan, sehingga bawahan termotivasi mencapai kinerja sesuai standar yang ditentukan dalam anggaran.

Di setiap SKPD harus menerapkan partisipasi penyusunan anggaran yang nantinya bisa menjadi pedoman mencapai mutu dan kualitas yang baik. Maka penerapan pendekatan partisipasi penyusunan anggaran sangat penting dalam mencapai kinerja yang berkualitas/bertanggungjawab di setiap SKPD.

Dalam mencapai kinerja yang baik, organisasi Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Chintya 2015).

Tujuan SPIP akan tercapai jika mengimplementasikan unsur-unsur SPIP pada Pemerintah Daerah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal juga berfungsi untuk menciptakan kinerja pegawai Pemerintah Daerah yang tertib, terkendali, dan melakukan praktik kerja yang baik. Dengan

diterapkan SPIP maka dapat memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa pelaksanaan semua kegiatan di setiap SKPD yang dilakukan setiap pegawai tidak terjadi penyimpangan dan dapat mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal Pemerintah ini melekat pada semua kegiatan instansi Pemerintah dan berdampak terhadap kinerja pegawai yang menunjukkan sejauh mana setiap pegawai mengenal dan memahami sesuai bidang yang telah ditetapkan sebelumnya di instansi tempatnya bekerja.

Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik, organisasi Pemerintah Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam setiap bidangnya sehingga dapat tercipta kinerja yang berkualitas dan menjadikan masyarakat puas. Sumber daya manusia yang kompeten meliputi tentang kemampuan seorang individu, suatu organisasi atau sistem yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kinerja satuan kerja perangkat daerah sangat penting dalam rencana pelaksanaan program pembangunan untuk masyarakat di daerah, maka seluruh kegiatan diupayakan berjalan dengan efektif serta efisien. Sebagai lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengurus roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menyatakan pertanggungjawaban kinerja setiap pegawainya untuk dievaluasi sejauh mana Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

Permasalahan dalam mewujudkan target kinerja yang berkualitas menjadi tantangan disetiap pegawai satuan kerja perangkat daerah. Sampai saat ini fenomena yang masih dijumpai yaitu tingkat kesadaran yang kurang dari setiap pegawai untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Sehingga kinerja yang dihasilkan oleh aparatur Pemerintah Daerah tersebut kurang bermanfaat atau tidak begitu berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penjelasan tersebut, maka kinerja Pemerintah Daerah harus benar-benar dilaksanakan secara baik dan benar. Oleh karena itu aparaturnya Pemerintah Daerah harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya agar hasil dari kinerja tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada setiap masyarakat.

Terdapat sebuah ayat didalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kinerja, dalam surat Al-Ahqaaf ayat 19, yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagimereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”*

Dalam kandungan ayat tersebut, bahwasanya Allah SWT pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Dalam kaitannya dengan kinerja, yaitu jika setiap pegawai Pemerintah Daerah melakukan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik bagi instansinya maka akan memperoleh hasil yang baik pula dari pekerjaannya dan dapat memberikan manfaat untuk instansinya sendiri maupun masyarakat.

Fenomena pada kinerja setiap pegawai harus dikaji lebih lanjut, karena bagi Pemerintah Daerah memiliki kinerja yang berkualitas merupakan sebuah keharusan karena kinerja Pemerintah Daerah yang berkualitas mencerminkan bahwa setiap pegawai melaksanakan tugasnya dengan tertib dan taat peraturan. Belum optimalnya suatu kinerja yang terjadi di Pemerintah Daerah pada umumnya disebabkan karena kurangnya profesionalisme aparaturnya. Penataan sumber daya aparaturnya yang profesional merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar pemerintahan menjadi lebih berkualitas dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja aparaturnya Pemerintah Daerah, telah dilakukan

berbagai pelatihan struktural, fungsional, maupun teknis agar nantinya tercipta aparatur yang profesional, baik dalam arti integritas, moralitas, dan etika yang tinggi dalam menjalankan praktiknya sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, dalam hal ini peneliti terbatas membahas mengenai Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dalam menjelaskan penelitian ini adalah antara lain:

1. Apakah Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
2. Apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?

3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan kemajuan dan menjadi informasi tambahan bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman tentang akuntansi sektor publik, yang dimana dapat membantu untuk mempermudah atau menjadikan penelitian ini sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan suatu kinerja pada Pemerintah Daerah agar lebih maksimal dalam hal melayani masyarakat sehingga

menghasilkan kinerja yang berkualitas yang sesuai peraturan perundang-undangan serta nantinya diharapkan dapat menambah wawasan baik teori maupun praktik yang berhubungan dengan kinerja dan dapat memberikan peranan positif dalam usaha penerapan akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan sistem pengendalian internal dalam mempengaruhi kualitas kinerja terutama bagi daerah lokasi penelitian.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah dalam hal ini Organisasi Pemerintah Daerah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.